



## 63 Kendaraan Dinas Segera Dilelang

UMBULHARJO (MERAPI) - Lelang kendaraan dinas Pemkot Yogyakarta bakal digelar pekan depan setelah mendapat kepastian jadwal dari Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Yogyakarta. Lelang kendaraan dinas ditarget minimal mencapai total harga terendah yang ditetapkan sekitar Rp 207 juta.

Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Yogyakarta Andi Sasongko mengatakan, lelang kendaraan dinas akan diadakan pada 9 Agustus 2018. Total kendaraan yang akan dilelang berjumlah 63 kendaraan yang meliputi kendaraan roda dua, roda tiga dan kendaraan roda empat. "Lelang kendaraan dinas dilakukan secara online. Lelangnya terbagi dalam tiga paket karena mengikuti ketentuan jumlah yang dilelang maksimal 25 unit," kata Andi, Selasa (31/7).

Pada paket pertama ada 20 sepeda motor dengan harga terendah bervariasi antara Rp 623 ribu hingga Rp 1,2 juta. Untuk paket kedua sebanyak 19 sepeda motor dan 2 sepeda motor roda tiga produksi antara 1996 hingga 2009. Sedangkan paket ketiga sebanyak 20 kendaraan roda empat dengan harga terendah Rp 3,6 juta untuk Suzuki Carry 1993 sampai harga limit tertinggi mencapai Rp 21,2 juta untuk Mitsubishi L-300 tahun 2005. "Total harga terendah untuk seluruh kendaraan dinas yang akan dilelang tahun ini mencapai Rp 207,07 juta," imbuhnya.

Dia menyampaikan masyarakat yang ingin mengikuti lelang dapat mendaftar dan mengaktifkan akun melalui laman [www.lelangdjk.nkemenkeu.go.id](http://www.lelangdjk.nkemenkeu.go.id). Untuk penawaran lelang dilakukan secara tertulis melalui aplikasi lelang email (ALE). Penawar juga harus menyerahkan uang jaminan dengan nilai minimal 20 persen dari harga terendah atau maksimal 50 persen dari harga terendah.

Peserta lelang dapat melihat langsung kendaraan yang akan dilelang di Gudang Aset BPKAD Kota Yogyakarta di Jalan Nyi Pembayun Kotagede. Khusus roda empat Mitsubishi L-300 2005 di parkir basement Gedung Blok H RS Jogja.

"Lelang kendaraan dinas ini untuk menghapus aset pemerintah. Mengikuti ketentuan operasional kendaraan dinas maksimal tujuh tahun. Jika lebih dari itu biaya perawatan bisa cukup besar sehingga menjadi tidak efisien anggarannya," ucap Andi. (Tri)-a

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 04 Oktober 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005